

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan globalisasi yang semakin pesat menyebabkan keberadaan sektor pertanian menjadi begitu penting dalam stabilitas ketahanan pangan dunia. Hal ini juga berhubungan dengan eksistensi negara-negara dunia ketiga sebagai subyek penyedia pangan dunia, hanya saja kelompok negara ini masih menghadapi berbagai persoalan mengenai bidang pertaniannya, yaitu keterbatasan dalam penguasaan teknologi, ketergantungan yang begitu besar terhadap iklim dan cuaca, serta keterbatasan dalam mengolah komodita setengah jadi menjadi produk jadi.¹

Sudan merupakan salah satu negara Afrika yang menghadapi permasalahan bidang pertanian. Negara ini sejak dekade 1940-an telah membangun sistem pertanian secara tradisional yang kemudian nilai-nilai yang ada di dalamnya ditransformasikan secara turun-temurun. Akibatnya produksi pertanian negara ini cenderung statis dan rawan krisis akibat pengaruh musim dan faktor-faktor lainnya.

Sudan merupakan salah satu negara di wilayah Afrika yang berbatasan dengan Mesir, Ethiopia, Kenya, Uganda, Chad, Libya dan Zaire. Negara ini merupakan negara yang memiliki luas wilayah terbesar di Afrika. Meskipun mayoritas penduduk

¹ James C. Norton, *Achieve of MDG's : Beware Poverty and Food Crisis*, Rutgers University Press and Publishing, New Jersey, 2004, hal.29.

Sudan beragama Islam, namun negara ini tidak dijalankan melalui ideologi agama, seperti halnya Libya.² (*Peta Sudan Lihat Lampiran 1*)

Pada tahun 2000 perekonomian Sudan mengalami perkembangan yang menarik. Negara ini memiliki mitra kerjasama luar negeri dan ekspor -impor dengan total nilai rata-rata pertahun sebesar 362,233 juta US Dollar, masing -masing adalah Cina sebesar 20,2 persen, Arab Saudi sebesar 8,5 persen, Uni Emirat Arab sebesar 6,3 persen, Mesir sebesar 5,4 persen, India 5,1 persen, Italia, 4,8 persen dan negara - negara lainnya dalam jumlah yang lebih kecil.³

Pada tahun 2001 terjadi krisis perekonomian di Sudan. Nilai ekspor negara ini mengalami penurunan hingga 38 persen. Masalah ini terjadi akibat pemerintah terlalu berfokus pada komoditas minyak mentah (*crude oil*). Akibatnya saat terjadi penurunan harga minyak di Timur-Tengah, perekonomian Sudan akan turut terpengaruh.

Permasalahan tentang ketergantungan terhadap Minyak Bumi telah menjadi isu yang mengemuka sejak awal dekade 1990 -an. Tepatnya pada tahun 1992 terjadi krisis minyak dimana terjadi peningkatan harga sekitar 76 US Dollar perbarell. Pada tahun sebelumnya harga minyak sekitar 52 US Dollar perbarell. Peningkatan harga minyak ini ternyata tidak disertai dengan peningkatan pendapatan nasional Sudan.⁴

² "Sudan: Profile of Demography", <http://www.answer.com>., diakses pada tanggal 16 Oktober 2011.

³ "Economy of Sudan", The Book of Fact, <http://www.cia.gov>., diakses pada tanggal 16 Oktober 2011.

⁴ "Not More to Joint International Corporation : The Economy Sudan Failure To Achieve of Tactical Profit", <http://www.allafrica.com>., diakses pada tanggal 23 April 2012.

Sejak awal dekade 1980-an memang telah banyak perusahaan-perusahaan internasional, antara lain Tam Oil, Exxon, British Petroleum, Global Petro America dan beberapa perusahaan raksasa lainnya yang telah berhasil mengeksplotasi sumber minyak bumi di Sudan. Kasus ini kemudian menyebabkan berbagai persoalan, antara lain kemajuan perekonomian Sudan yang tersentralisir pada wilayah-wilayah yang memiliki kilang minyak, kesulitan pemerintah Sudan dalam pemeratakan kesejahteraan penduduk dan kondisi stabilitas perekonomian yang rawan krisis karena ketergantungan perekonomian Sudan terhadap satu unit sumber daya saja, yaitu minyak bumi.⁵

Pada akhirnya krisis perekonomian yang terjadi di Sudan mendorong presiden Hassan Al-Bashir untuk membangun pilar-pilar perekonomian nasional yang tidak tergantung pada satu komoditas saja. Ini dapat dilihat dari pernyataan Hassan Al-Bashir pada sidang ke-IV majelis dan kabinet di ibu kota Khourtum yang menyatakan bahwa :

”...pemerintah perlu inovasi untuk menyelamatkan dan memajukan perekonomian ”jundulwathan” (tanah air Sudan). Kita akan bernasib sama dengan negara-negara tetangga apabila terus membanggakan apa yang kita peroleh secara cuma-cuma. Saat masyarakat begitu berharap kita tidak boleh berdiam diri untukdengan segera membangun sektor lain, pertanian menjadi pilihan utama kami.”⁶

⁵ *Ibid.*

⁶ “Hassan Al-Bashir Says To More People Of Miracle Farm”, <http://www.allafrica.com>., diakses pada tanggal 15 Oktober 2011.

Pernyataan di atas menjadi bukti bahwa tahun 2006 hingga 2010 menjadi periode yang begitu penting bagi dinamika bidang pertanian Sudan. Pernyataan ini sekaligus menjadi spirit sekaligus sikap politik (*politucal will*) bagi stakeholder Sudan agar bersama-sama dengan masyarakat berupaya mengembangkan bidang pertanian sebagai pilar perekonomian nasional.

Keberadaan sektor pertanian Sudan ternyata cukup potensial, hanya saja keberadaannya belum dikelola secara moderen. Sektor ini menjadi semakin penting karena menjadi mata pencaharian sebagian besar masyarakat Sudan mencapai 61 persen atau sekitar 18 juta jiwa. Ini berarti sektor pertanian Sudan, bukan hanya potensial dalam mendukung perekonomian nasional, namun juga kesejahteraan masyarakat dalam skala yang luas. Komoditas unggulan pertanian Sudan masing-masing dapat dilihat pada tabel 1.1. sebagai berikut :

Tabel. 1.1.
Komoditas Pertanian Utama Sudan
Tahun 2000-2006

No.	Komoditas	Tahun 2000	Tahun 2003	Tahun 2006
1.	Kapas	17.862 ton	16.862 ton	14.862 ton
2.	Tebu	18.662 ton	17.262 ton	14.962 ton
3.	Kacang-kacangan	9.113 ton	7.813 ton	7.116 ton
4.	Buah-buahan	21.906 ton	21.023 ton	19.834 ton
5.	Pangan Utama	18.688 ton	17.281 ton	14.221 ton

Sumber : "The Sudan Farm Comodities", <http://www.businnesdoing.com>., diakses pada tanggal 16 Oktober 2011.

Melalui tabel 1.1. di atas maka dapat diketahui bahwa komoditas utama yang dihasilkan oleh pertanian Sudan adalah kapas dan tebu, dilanjutkan dengan komoditas kacang-kacangan, buah-buahan dan pangan utama, mencakup jagung, padi dan gandum. Dari tahun 2000 hingga 2006 terdapat tren penurunan, meskipun secara nominal jumlahnya masih relatif besar.

Karakteristik pertanian Sudan yang masih dikelola secara tradisional membuatnya sulit untuk bertahan. Di lain pihak perekonomian nasional Sudan yang sangat tergantung pada ekspor minyak mentah ternyata membuatnya cenderung labil. Fakta inilah yang mendorong pemerintah Sudan untuk menjalankan modernisasi bidang pertanian agar dapat menjadi penopang perekonomian nasional.

Sejak dekade 1990-an, pertanian di Sudan masih dipusatkan pada daerah-daerah yang banyak memiliki cadangan air dan lembab, antara lain wilayah sungai Nil, Qasala, Al-Jazirah dan Al-Qadarif. Sebagian besar lahan mengandalkan pola tadah hujan, sebagian lagi mengandalkan aliran primer dari sungai Nil. Pada masa pemerintahan Hassan al-Bashir sektor ini terus dikembangkan agar semakin maju dan potensial.

Hingga periode 2001-2010 berbagai upaya yang dijalankan pemerintah Sudan ternyata belum membuahkan hasil yang optimal. Inilah yang kemudian melatarbelakangi pemerintah Sudan dalam menjalankan program kerjasama internasional dalam mendukung modernisasi bidang pertanian untuk kemajuan perekonomian nasional.

B. Perumusan Masalah

Melalui uraian latar belakang masalah di atas maka dapat di tarik rumusan masalah yaitu :

”Bagaimana upaya kerjasama internasional pemerintah Sudan dalam mendukung modernisasi bidang pertanian agar mampu berperan sebagai pilar utama pendukung perekonomian nasional ?”

C. Kerangka Dasar Pemikiran

Dalam upaya menjawab rumusan masalah dan menarik hipotesa maka penulis menggunakan beberapa pendekatan yang relevan, yaitu teori kerjasama internasional. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjembatani berbagai persoalan tentang kebijakan Sudan dalam membangun sistem pertanian moderen agar dapat menjadi penopang perekonomian nasional.

Seiring dengan berkembangnya globalisasi pergeseran orientasi ekonomi - politik luar negeri negara-negara dunia semakin berubah. Interaksi -interaksi luar negeri semakin intensif dijalankan sebagai bagian pencapaian kepentingan nasional (*national interest*). Ini juga menunjukkan sebuah fenomena bahwa kepentingan nasional suatu negara sifatnya adalah tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang dimiliki sifatnya adalah terbatas. Inilah yang kemudian menjadi latar belakang / motivasi bagi negara-negara dunia dalam menjalankan kerjasama internasional.⁷

⁷ Joseph Nye, ” Long Road To International Integration” dalam William Meyer, *Global News Flows : Dependency and Neoimperialism* , Princenton University Press, New Jersey, 2002, hal.89.

Joseph Nye menyatakan bahwa kerjasama internasional memiliki dua makna penting, yaitu :⁸

a. Pemeliharaan.

Makna pemeliharaan sebagai motif kerjasama luar negeri menekankan bahwa upaya negara dalam menjaga kelangsungan kerjasama yang sebelumnya telah ada. Hal ini penting agar tidak terjadi manuver-manuver negara mitra kerjasama untuk meninggalkan dan memilih negara lain. Makna pemeliharaan juga berkaitan dengan upaya-upaya suatu negara dalam membangun kemitaraan yang berorientasi pada peningkatan kualitas dan hasil yang memungkinkannya untuk menjalankan evaluasi secara terus-menerus.

b. Pencapaian.

Makna pencapaian sebagai motif kerjasama luar negeri menekankan bahwa suatu negara dituntut harus dapat mengembangkan strategi-strategi baru dalam mencari mitra-mitra kerjasama yang sebelumnya belum pernah dijalankan. Dalam kerjasama baru negara-negara yang baru saja menjalankan kerjasama dapat memperjuangkan kepentingannya sebagai bagian maksimalisasi pencapaian.

Melalui paparan pendekatan di atas maka dapat diaplikasikan bahwa latar belakang Sudan dalam menjalankan kerjasama internasional untuk mendukung

⁸ *Ibid,*

modernisasi merupakan bentuk upaya pencapaian kepentingan nasional. Apabila ditinjau dari bentuknya maka, kerjasama internasional dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu :⁹

a. Kerjasama Universal

Kerjasama universal adalah memadukan semua bangsa untuk mempersatukan cita-cita dalam tujuan bersama untuk menghindarkan disintegrasi internasional. Adapun sebagai contoh kerjasama universal dalam bidang olahraga adalah adanya Olympiade yang universal selain itu contoh lainnya adalah yaitu didirikannya Perserikatan Bangsa-Bangsa.

b. Kerjasama Regional

Kerjasama regional merupakan kerjasama antar negara yang berdekatan secara geografis, yang menentukan dalam kerjasama regional ialah kedekatan geografisnya namun belakangan faktor geografis saja tidak memadai untuk menentukan kerjasama regional itu, kesamaan pandangan politik dan kebudayaan atau perbedaan struktur dan produktifitas ekonomi dari negara-negara yang hendak bekerjasamalah yang menjadi tolak ukur suatu kerjasama regional.

⁹ Budiono Kusumohamidjojo, *Hubungan Internasional Kerangka Studi Analitis*, Penerbit Binacipta, Jakarta, 1997, hal.38.

c. Kerjasama Ideologis

Kerjasama ideologis adalah kerjasama yang tidak berbentuk untuk melanggengkan ideologi atau kekuasaan tertentu. Ideologi sendiri memiliki pengertian yang mana telah mengalami perkembangan sejak awal abad ke - XIX yaitu sebagai alat dari suatu kelompok kepentingan untuk membenarkan tujuan dari perjuangan kekuasaannya, dalam kerangka hubungan internasional kelompok kepentingan yang paling relevan adalah negara namun dalam kerjasama ideologis batasan teritorial adalah tidak relevan, kerjasama ideologis adalah kerjasama yang paling tidak berbentuk dan kerjasama ideologis sering memperlakukan negara sebagai penghambat utama atau terkadang malahan sebagai sasaran perjuangan dari kelompok atau negara.

d. Kerjasama Perekonomian dan Teknik (Kerjasama Fungsional)

Kerjasama fungsional (kerjasama perekonomian dan teknis) adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh dua negara atau lebih, yang umumnya juga memanfaatkan fungsi mediasi dari organisasi internasional untuk menyelesaikan masalah tertentu secara teknis, misalnya penyelesaian konflik, pengembangan ilmu pengetahuan, pemberdayaan wilayah perbatasan dan pengelolaan lingkungan hidup, hingga pengembangan wilayah pantai dan agraris.

Kerjasama fungsional merupakan mekanisme penting dalam mendukung berbagai penyelesaian teknis masalah-masalah yang berkembang di suatu negara, antara lain pada bidang ekonomi, sosial hingga pengembangan alih teknologi. Kerjasama fungsional menjadi wujud interaksi negara-bangsa yang paling populer pasca berakhirnya Perang Dunia II yang menyebabkan orientasi politik luar negeri negara-negara dunia tidak lagi bersifat dogmatis, namun telah berkembang ke arah pragmatis.¹⁰

Empat kategori di atas yang paling relevan dengan kasus kerjasama internasional pemerintah Sudan dalam mendukung modernisasi bidang pertanian adalah kerjasama fungsional. Melalui kerjasama ini nantinya akan dibahas berbagai macam program-program teknis yang kesemuanya terlepas dari faktor ideologis, universalitas dan regionalitas. Kerjasama perekonomian dan teknis adalah sebuah kerjasama diantara aktor-aktor formal yang dapat berupa negara, serta aktor non-formal sebagai contoh organisasi atau kelompok yang memiliki kepentingan yang sama sehingga menjalankan sebuah mekanisme persekutuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak tersebut, dalam bidang keamanan, khususnya untuk menangani berbagai permasalahan sosial dan perekonomian yang marak sehingga akan dihasilkan sebuah ikatan yang solid.¹¹

Jika dikaitkan dengan pemerintah Sudan dalam mendukung modernisasi bidang pertanian agar mampu berperan sebagai pilar utama pendukung perekonomian

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ "International Cooperation : Etimology", dalam <http://www.iseas.edu.>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2011.

nasional ternyata relevan dengan pendekatan di atas. Pada periode 2006 -2010 beberapa tindakan yang dijalankan oleh pemerintah Sudan adalah dengan menjalankan kerjasama bukan hanya dengan satu atau dua negara (monolateral atau bilateral), namun berbagai negara dunia, yaitu wilayah Amerika, Asia, Australia dan Eropa. Inilah yang kemudian lazim disebut sebagai kerjasama internasional.

Kemudian kerjasama ini ternyata dijalankan secara spesifik, artinya implementasinya dijalankan dalam kerangka kerjasama perekonomian dan teknis, termasuk alih teknologi, sehingga jika dikaitkan dengan pendekatan di atas maka upaya pemerintah Sudan dalam mendukung modernisasi bidang pertanian telah masuk ke ranah kerjasama fungsional. Melalui upaya ini pemerintah Sudan bersama dengan para stakeholder lainnya dapat memperoleh berbagaimasukan (input) yang berguna secara langsung dalam pengembangan berbagai hal yang terkait dengan bidang pertanian.

Kerjasama fungsional yang ditempuh pemerintah Sudan berawal dari kesepakatan maklumat (dekrit) yang dikeluarkan oleh presiden Hassan Omar Al-Bashir pada bulan Juli 2006 di ibu kota Khourtum yang menyatakan : “Sudan akan siap membuka diri dalam modernisasi dan secara sadar akan membuka hubungan kerjasama untuk mendukung kemajuan bidang pertanian”. Pada tahap pertama pemerintah Sudan berhasil mengirimkan 22 orang ahli pertanian untuk belajar ke Thailand selama 8 bulan.¹²

¹² “Sudan Promote To Joint Cooperation With Asian Countries”, <http://www.allafrica.com>., diakses pada tanggal 30 November 2011.

Dalam kerjasama fungsional terdapat dua kategori kerjasama, masing-masing adalah kerjasama berimbang dan tidak berimbang, yaitu :¹³

- a. Kerjasama berimbang (*proportional of defense cooperation*), yaitu kerjasama pertahanan yang dijalankan oleh negara-negara yang memiliki kapastian sumber daya teknik perekonomian yang sama, misalnya negara maju dengan negara maju atau negara dunia ketiga dengan sesamanya.
- b. Kerjasama yang tidak berimbang (*unproportional of defense cooperation*), yaitu kerjasama teknis dan perekonomian yang dijalankan oleh negara-negara yang memiliki karakteristik yang berbeda. Umumnya dilakukan oleh negara maju terhadap negara miskin/berkembang.

Kategori yang masuk dalam kerjasama internasional pemerintah Sudan dalam mendukung modernisasi bidang pertanian merupakan bentuk kerjasama yang tidak berimbang. Secara faktual negara-negara yang menjadi mitra kerjasama Sudan antara lain Thailand, Australia, Indonesia dan beberapa negara lainnya terlebih dulu menjadi negara yang mampu menguasai budidaya dan alih teknologi pertanian secara maksimal. Di lain pihak, keberadaan Sudan berperan sebagai negara donor yang membutuhkan berbagai dukungan untuk mengembangkan sektor pertanian antara lain pengadaan kebutuhan transfer teknologi, dukungan modal dan program dengan negara-negara dunia.

Apabila dikaitkan dengan pendekatan tentang teori kerjasama di atas maka keberadaan Sudan dalam bidang pertanian ternyata tidak lepas dari kebutuhan transfer

¹³ *Ibid.*

teknologi, dukungan modal dan program. Ini sekaligus menunjukkan bahwa dalam mendukung kerjasama yang dibangun Sudan, antara lain dengan Cina, Thailand, Indonesia, Brazilia dan beberapa negara Eropa menunjukkan pola yang tidak berimbang.

Kemudian jika dikaitkan dengan pendekatan yang dikemukakan oleh Joseph Nye maka upaya pemerintah Sudan merupakan bagian dari pencapaian, bukan pemeliharaan. Pemerintah Sudan sendiri beberapa tahun setelah kemerdekaanya telah menyelenggarakan kerjasama luar negeri sebagai bagian dari upaya pencapaian kepentingan nasional, seperti melalui Organisasi Uni Afrika ataupun Gerakan Non - Blok (Non-Aligment Movement), namun kerjasam internasional-fungsional pada bidang pertanian baru terealisasi pada tahun 2006.

Beberapa bentuk kerjasama meliputi transfer teknologi berhasil dicapai oleh Sudan melalui kerjasamanya dengan Thailand pada tahun 2006. Tranfer teknologi ini meliputi pemuliaan tanaman, tumpang sari (diversifikasi tanaman pada satu lahan) dan pengolahan pasca panen. Selain itu, pada tahun 2007 pemerintah Sudan juga berhasil menerima bantuan lunak dari pemerintah Amerika Serikat melalui USAID (*United States Agency of International Development*) yang akan dialokasikan untuk memodernisasi sistem irigasi.¹⁴

Kerjasama internasional-fungsional melalui alokasi bantuan luar negeri dan teknis (program) sekaligus menunjukkan bahwa pola kerjasama bidang pertanian yang dijalankan merujuk pada konsep kerjasama tidak berimbang. Di satu sisi Sudan

¹⁴ *Ibid.*

diposisikan sebagai pihak yang membutuhkan (inferior), namun di sisi lain pihak-pihak yang memosisikan sebagai donor memiliki posisi superior, dimana program-program transfer teknologi, pinjaman modal dan program nantinya akan menjadi penyelesaian masalah (*trouble shooter*) bagi kasus keterbelakangan bidang pertanian di Sudan.

Mitra kerjasama luar negeri Sudan begitu mendominasi, sedangkan keberadaan Sudan diposisikan sebagai negara donor atas bantuan program, investasi, dukungan teknis dan lain-lainnya, Ini sekaligus menjadi kebijakan yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya antara Sudan dan negara yang menjadi mitra kerjasama yang pada akhirnya dapat membawa pertanian Sudan ke arah yang lebih baik.

D. Hipotesa

Melalui uraian di atas maka dapat ditarik hipotesa bahwa upaya kerjasama internasional dan fungsional pemerintah Sudan dalam mendukung modernisasi bidang pertanian agar mampu berperan sebagai pilar utama pendukung perekonomian nasional diwujudkan melalui beberapa hal, yaitu :

- a. Pengadaan kebutuhan transfer teknologi.
- b. Dukungan pinjaman modal dan program dengan negara-negara dunia.

E. Metodologi Penelitian

1. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang menitikberatkan pada analisa data -data yang sifatnya non-angka dan tanpa menggunakan rumus-rumus statistik sebagai pendekatannya.¹⁵

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis pergunakan adalah menggunakan pengumpulan data sekunder, yaitu penulis tidak menjalankan observasi langsung di lapangan, namun berdasarkan pada data yang telah tersedia, dengan melakukan telaah pustaka pada sejumlah literatur, yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang diteliti yaitu antara lain :¹⁶

- a. Buku-buku
- b. Jurnal dan dokumen
- c. Majalah dan surat kabar
- d. Artikel-artikel dan data dari internet (*web site*)

3. Metode Analisa

Metode analisa dalam penulisan ini adalah menggunakan tipe analisa deskriptif kualitatif dengan memberikan gambaran yang bersifat penjelasan secara

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hal.12.

¹⁶ *Ibid.*

nyata dan perkembangan mendatang tentang dinamika kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Sudan dalam mendukung kemajuan perekonomian sebagai pilar perekonomian nasional.¹⁷

F. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab perumusan masalah serta membuktikan hipotesa tentang kerjasama luar negeri pemerintah Sudan dalam mendukung modernisasi bidang pertanian agar mampu berperan sebagai pilar utama pendukung perekonomian nasional.
2. Untuk mengetahui tentang sejauh mana keberhasilan kebijakan pemerintah Sudan dalam mendukung modernisasi bidang pertanian agar mampu berperan sebagai pilar utama pendukung perekonomian nasional sehingga dapat menjadi masukan bagi kasus yang sama jika terjadi di Indonesia.
3. Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan spesialisasi Ilmu Hubungan Internasional pada Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta.

G. Jangkauan Penelitian

Dalam rangka memberi batasan agar penulisan skripsi ini tidak meluas, maka penulis membatasi penulisan ini pada tahun 2006-2010. Dilipih tahun 2006 karena

¹⁷ Catherine Cassel and Gillian Symon (editor), *Qualitative Methods in Organizational Research*, Sage Publications, London, 1994, hal.3-4.

merupakan periode awal pelaksanaan kerjasama internasional pemerintah Sudan dalam mendukung kemajuan bidang pertanian, sedangkan tahun 2010 dipilih karena merupakan tahun yang menunjukkan keberhasilan pemerintah Sudan dalam mendukung kemajuan bidang pertanian. Jangkauan di luar tahun tersebut sedikit disinggung selama masih ada keterkaitan dan korelevanan dengan tema yang sedang dibahas.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi atas lima bab yang terbagi masing-masing sebagai berikut :

BAB I berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, metodologi penelitian, tujuan penelitian, jangkauan penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II membahas tentang profil Sudan, mencakup bidang sosial, ekonomi dan politik.

BAB III membahas tentang dinamika pertanian di Sudan dan ketergantungannya pada komoditas minyak bumi, serta gambaran bidang pertanian Sudan sebagai komoditas yang potensial.

BAB IV merupakan bab analisis pembuktian hipotesa yang membahas tentang kerjasama internasional pemerintah Sudan dalam mendukung modernisasi bidang pertanian agar mampu berperan sebagai pilar utama pendukung perekonomian

nasional melalui pengadaan kebutuhan transfer teknologi, dukungan modal dan program dengan negara-negara dunia.

BAB V berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya.